

*Pajak Sebagai Sumber Pendanaan BUMDes Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal*

**ROIKHATUL JANA**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah**

**UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

[Janahroikhatul952@gmail.com](mailto:Janahroikhatul952@gmail.com)

[No:0859162530611](tel:0859162530611)

**Abstrak:** This article aims to examine how taxes can be used as a source of funding for BUMDes in order to improve the village economy and the welfare of local communities. In this context, taxes are collected from village economic activities, such as taxes on local businesses or other taxes, which can support BUMDes programs that focus on community empowerment, infrastructure development and providing public services. This research analyzes the use of BUMDes for the community, factors that influence BUMDes development, empowerment strategies and acceleration of BUMDes development. The results of this research are that with good management and active community participation, taxes can be an effective tool in strengthening the sustainability of BUMDes and increasing the welfare of local communities.

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pajak dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi BUMDes dalam rangka meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan komunitas lokal. Dalam konteks ini, pajak di himpun dari kegiatan ekonomi desa, seperti pajak atas usaha lokal atau pajak lainnya, yang dapat mendukung program-program BUMDes yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan penyedia layanan publik. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan BUMDes bagi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BUMDes, Strategi pemberdayaan dan percepatan perkembangan BUMDes. Hasil penelitian ini yaitu dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam menjadi alat yang efektif dalam memperkuat keberlanjutan BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

## PENDAHULUAN

Pengembangan BUMDes memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal karena BUMDes memiliki peran strategis dalam perekonomian desa yang dapat langsung berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan BUMDes adalah terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia. Dalam konteks ini, pajak desa dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan yang potensial. Meskipun pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban yang membebani masyarakat, tetapi jika di kelola dengan baik, pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendanai kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan penyedia layanan publik.

BUMDes, sebagai badan usaha yang dimiliki dan di kelola oleh desa, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana secara efektif guna mendukung kesejahteraan warganya. Oleh karena itu penting bagi desa untuk memanfaatkan pajak sebagai instrument finansial yang dapat mendukung pengelolaan BUMDes. Pemungutan pajak yang tepat dan penggunaan dana pajak yang bijak dapat menciptakan perekonomian desa, yang nantinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, pemanfaatan pajak desa sebagai sumber pendanaan BUMDes tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat, keterbatasan kapasitas pengelola pajak desa, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang jelas dalam mengoptimalkan potensi pajak desa untuk mendanai BUMDes yang berkelanjutan.

Beberapa masalah mendasar yang di hadapi oleh BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal: 1) Keterbatasan (SDM): BUMDes sering kali kekurangan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha, manajemen, serta keterampilan teknis lainnya. 2) Modal Yang Terbatas: Banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam memperoleh modal yang cukup untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mereka. 3) Manajemen yang Lemah: Beberapa BUMDes menghadapi masalah dalam hal manajemen yang baik dan transparansi. 4) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan fasilitas pendukung usaha, serta kurangnya teknologi informasi yang memadai, dapat menghambat kemajuan BUMDes dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan komunitas. 5) Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Masyarakat desa seringkali tidak sepenuhnya memahami atau tidak terlibat dalam program-program yang di jalankan oleh BUMDes.

Tujuan dari artikel ini untuk menguraikan peran pajak sebagai sumber pendanaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Artikel ini berfokus bagaimana menganalisis Pembangunan desa melalui penggunaan pajak desa, strategi dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes), dampak penggunaan pajak desa terhadap pembangunan infrastruktur. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memeberikan wawasan bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat dalam memahami pentingnya pajak dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

## **METODE**

Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif seperti pendekatan studi kasus memilih beberapa Desa sebagai sampel yaitu Desa Kepatihan Wiradesa yang memiliki BUMdes dan menerapkan pajak desa. Teknik pengumpulan data mencangkup wawancara, survei, dan observasi, sedangkan data yang di kumpulkan tersebut di ambil dari wawancara dengan pengelola BUMdes, perangkat desa, dan Masyarakat untuk memahami persepsi pengalaman terkait pajak. Hasil pengabdian ini yaitu dengan adanya peran pajak desa memberikan manfaat yang signifikan terhadap perekonomian Masyarakat. Jadi di simpulkan bahwa dengan pendanaan yang di hasilkan dari pajak, desa dapat mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan mengelola sumber daya yang efektif. Peran pajak desa tidak hanya penting untuk Pembangunan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa secara keseluruhan.

## **HASIL**

### **Pembangunan Desa Melalui Penggunaan Pajak Desa**

Dalam Pembangunan desa menunjukkan dampak yang cukup besar dalam memperbaiki kualitas hidup Masyarakat. Seiring dengan pengumpulan pajak yang lebih terstruktur, banyak desa mulai mengalokasikan dana yang di peroleh untuk membangun infrastruktur dasar yang mendukung ekonomi dan sosial. Salah satu yang signifikan dari pemanfaatan pajak desa. Adalah Pembangunan infrastruktur PAM, Penyediaan air minum yang berasal dari PAM membawa berbagai manfaat aksesibilitas dan kualitas hidup. Contoh yang paling sederhananya seperti dengan adanya ketersediaan air tersebut warga desa akan terhindar dari berbagai penyakit yang di sebabkan oleh air kotor.

Selain itu, pajak desa yang di kumpulkan di Desa Kepatihan juga untuk Pembangunan tempat pembuangan sampah di desa. Salah satu hasil utama dari Pembangunan sampah yang baik di desa adalah peningkatan kebersihan lingkungan.

Sebelum adanya tempat pembuangan yang terorganisir, banyak sampah dibuang sembarangan, yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan berkembangnya berbagai penyakit. Setelah pembangunan tempat pembuangan sampah yang terpisah dan dikelola dengan baik, desa menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihuni. Masyarakat mulai terbiasa membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga mengurangi sampah yang berserakan di sekitar permukiman. Di sisi lain juga dengan tempat pembuangan sampah yang tertata dengan baik, pemandangan desa menjadi lebih indah dan nyaman. Karena sampah yang di biarkan menumpuk di tempat terbuka dapat mencemari pemandangan dan membuat desa terlihat kumuh. Namun dengan adanya tempat pembuangan yang terstruktur, desa menjadi lebih rapi dan estetis, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

### **Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Melalui Pajak untuk meningkatkan (PADes) Melalui Pajak Untuk meningkatkan PADes, banyak desa mulai mengoptimalkan potensi pajak yang ada di wilayah mereka, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, retribusi usaha, dan pajak-pajak lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi lokal. Pengelolaan pajak yang efisien dan terstruktur menjadi strategi utama yang dilakukan oleh desa-desa yang berhasil meningkatkan PADes. Melalui pengelolaan pajak yang baik, desa tidak hanya memperoleh dana dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga mengembangkan sumber pendapatan yang lebih mandiri.

Hasilnya, banyak desa berhasil memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari pajak yang diterima, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Salah satu contoh strateginya adalah dengan melakukan pendataan dan pemetaan objek pajak secara lebih tepat, sehingga pajak yang diterima bisa lebih optimal. Desa-desa yang berhasil juga mulai membentuk sistem pelaporan pajak yang transparan, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk kemajuan desa. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberi rasa memiliki terhadap program-program yang ada.

### **Dampak Penggunaan Pajak Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur**

Penggunaan pajak desa dalam Pembangunan infrastruktur telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam akses terhadap air bersih bagi masyarakat desa. Sebelum adanya penggunaan dana pajak untuk pengembangan infrastruktur air minum, sebagian warga desa kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan harus mengandalkan sumur atau sumber air yang kurang terjaga kebersihannya. Namun, setelah dana pajak dialokasikan untuk pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (PAM), lebih banyak rumah tangga di desa kini memiliki akses yang lebih mudah dan aman terhadap air bersih. Proyek ini berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi.

Selain itu Pembangunan tempat pembuangan sampah yang terorganisir, penggunaan pajak desa juga berdampak pada Pembangunan tempat pembuangan sampah yang terkelola dengan baik di beberapa desa. Dengan adanya dana pajak yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pembuangan sampah, desa dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Tempat pembuangan sampah yang lebih terorganisir membantu mengurangi sampah yang berserakan di lingkungan, mencegah pencemaran, dan meningkatkan kualitas estetika desa. Maka dari perbaikan kualitas lingkungan desa yang tadi di sebutkan, desa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Akses terhadap air bersih yang lebih baik mengurangi masalah sanitasi, sementara pengelolaan sampah yang lebih baik mengurangi polusi dan meningkatkan kebersihan umum. Perbaikan ini juga berdampak pada daya tarik desa sebagai tempat tinggal, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan ekonomi lokal.

## **PEMBAHASAN**

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.

Memperhatikan pentingnya APBDDes, menurut "UU Desa", pemerintah desa akan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan nominal subsidi desa yang nominalnya berbeda-beda di setiap desa Upaya untuk mendorong desa menjadi mandiri harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Secara teknis pemerintah desa harus bersinergi dengan pemerintahan di atasnya sebagai pola pendampingan Prosedur ini tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat satu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa bantuan berjenjang harus diberikan sesuai kebutuhan.

Tujuan pendampingan berjenjang dalam peraturan ini adalah untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri. Komunitas yang mandiri mampu memainkan peran penting dalam upaya pembangunan pedesaan secara konsisten terus menerus Keberadaan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan potensi sumber daya profesional sehingga dapat dijadikan landasan dasar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa akan menjadikan desa tersebut berkembang dalam segala aspek terutama dalam hal infrastruktur yang merupakan kebutuhan utama di dalam masyarakat. Salah satu program pemerintah desa dengan dasar hukum yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. pajak desa ini biasanya mencakup berbagai jenis pajak yang di pungut oleh desa, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk pedesaan, pajak usaha, atau pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan social di tingkat desa. dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan dikeluarkannya pajak Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menyatakan bahwa pajak desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes) yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa. Sebagai sumber pendapatan, pajak desa berfungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan ditingkat desa, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan kemandirian desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan penyediaan layanan publik di desa.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu tanggung jawab pemerintahan desa tersebut.

Pembangunan desa perlu diarahkan agar warga desa mempunyai semangat tinggi dalam membangun desa, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan didesa dengan seefisien dan seefektif mungkin dengan bertumpu pada sumber dana dan menjaga kelangsungan proses pembangunan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

### **Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa**

Pelaksanaan strategi merupakan tahap penting dalam proses manajemen strategis yang dijelaskan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen. Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), pelaksanaan strategi harus melibatkan implementasi yang efektif dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dengan keadaan lingkungan sebuah organisasi. Pelaksanaan strategi pada dasarnya merupakan lanjutan dari penyusunan strategi. Skala prioritas menjadi pelaksaannya utama dalam pelaksanaan strategi sehingga dapat memenuhi target yang ingin di capai. Dalam mencapai peningkatan PADes Desa Kepatihan melaksanakan strategi yang sudah disusun dalam perencanaan sebelumnya.

Pelaksanaan strategi di tingkat operasional merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua BUMDes. BPD memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan jadwal melalui kunjungan lapangan dan rapat koordinasi dengan pihak pelaksana. Sementara itu, Ketua BUMDes bertugas menyusun strategi besar menjadi rencana aksi mingguan dan bulanan. Mereka juga memastikan adanya aliran komunikasi yang baik antara manajemen dan staf operasional untuk menjaga keselarasan tujuan. Implementasi yang efektif ditingkat operasional ini sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan dan mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Keterangan Kepala Desa menjelaskan bahwa strategi berupa program-program kerja dilaksanakan mengikuti hasil musyawarah Bersama yang sudah menyusun rangkaian program. Dari itu pulak pula terkait keuangan dan manajemen dilakukan secara terbuka agar setiap lapisan yang ada di desa dapat mengetahui.

Berikut penjelasan mengenai strategi infrastruktur yang dapat di terapkan dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan pembuangan sampah:

#### **1. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih PAM**

Pembangunan system air bersih melibatkan berbagai tahapan, mulai dari sumber air hingga distribusinya ke konsumen. Strategi yang di terapkan yaitu:

- Pemenuhan kebutuhan sumber air, strategi ini fokus pada pemilihan dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, seperti sumur bor. Dalam beberapa kasus pemerintah atau perusahaan PAM melakukan pembenahan terhadap kualitas sumber air melalui pembangunan instalasi pengolahan air (IPA)

- Pengelolaan dan peningkatan jaringan distribusi, Infrastruktur jaringan pipa yang efisien dan minim kehilangan air sangat penting. Untuk itu, strategi ini mencakup pembangunan dan perbaikan sistem pipa distribusi yang luas dan terhubung, baik di perkotaan maupun daerah pedesaan.
- Penyediaan air bersih berkelanjutan, salah satu tujuan utama adalah menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan domestic, industri, dan social. Ini melibatkan penerapan teknologi pengolahan air yang ramah lingkungan dan efisien serta peningkatan kapasitas pengolahan agar dapat memenuhi permintaan yang terus berkembang.
- Keterjangkauan dan Aksesibilitas infrastruktur, air bersih juga harus dapat dijangkau oleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Ini melibatkan subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah, pembangunan fasilitas di daerah yang belum terlayani, serta pemantauan kualitas air secara terus menerus.

Air bersih dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan (Sutrisno, 1991:1).

Tujuan utama sistem penyediaan air adalah untuk menyediakan air yang cukup berlebihan, yaitu untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Tetapi pada masa kini ada pembatasan dalam jumlah air yang dapat diperoleh karena pertimbangan penghematan energi dan adanya keterbatasan sumber air (Noerbambang, 1993:3).

Dalam tinjauan aspek teknis, penyediaan air bersih dapat dibedakan duasistem (Chatib, 1996:25), yaitu:

- Sistem penyediaan air bersih individual (Individual Water Supply System). Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan individual atau pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan air tanah memiliki kualitas yang relatif baik dibanding sumber lainnya. Sistem penyediaan ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan distribusi. Kecuali pada penyediaan air bersih yang dibangun oleh pengembang untuk melayani suatu lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- Sistem penyediaan air bersih komunitas (Community/Municipality Water Supply System).

Sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan adalah suatu sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan untuk pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumah tangga (domestik), sosial maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan kompleks, baik dilihat dari teknis maupun sifat pelayanannya. Sistem penyediaan air meliputi beberapa peralatan seperti tangki air bawah tanah, tangki air diatas atap, pompa-pompa, perpipaan, dan sebagainya. Dalam peralatan-peralatan ini, air minum harus dapat dialirkan ke tempat-tempat yang dituju tanpa mengalami pencemaran.

## 2. Pembangunan Infrastruktur Pembuangan Sampah

Pembuangan sampah yang efektif memerlukan infrastruktur yang baik dan sistem manajemen yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, strategi yang di terapkan yaitu:

- Pengelolaan sampah berbasis sumber, strategi ini melibatkan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, seperti melalui program pemilahan sampah (organik, anorganik, dan berbahaya) dan edukasi masyarakat untuk memilah sampah secara mandiri.
- Sistem pengangkutan sampah yang efisien, infrastruktur pengangkutan sampah yang efektif dan terjadwal juga penting dalam menjaga kebersihan desa.
- Partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, seperti memilah sampah atau ikut serta dalam bank sampah, dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah.

### **Dampak penggunaan Pajak Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Akses Terhadap Air Bersih (PAM) dan Tempat Pembuangan Sampah**

Terbentuk pembangunan infrastruktur sebernanya sangat berdampak pada masyarakat. Karena pajak desa menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di tingkat desa. Infrastruktur desa yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung perekonomian lokal, dan mempercepat pembangunan sosial di daerah pedesaan. Manfaat yang di rasakan oleh masyarakat desa dari pembangunan infrastruktur yang di danai melui pajak desa sangat signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup.

Beberapa manfaat utama yang di rasakan dari pembangunan infrastruktur di desa kepatihan ini yaitu peningkatan akses terhadap air bersih (PAM) dan tempat pembuangan sampah.

1. Kesehatan masyarakat yang lebih baik: Akses yang lebih baik terhadap air bersih dapat mengurangi risiko penyakit yang di tularkan melalui air kotor, seperti diare, kolera, dan tifus. Begitu pula, pengelolaan sampah yang tepat dapat mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit yang berasal dari sampah yang menumpuk, seperti demam berdarah dsan saluran pernafasan.
2. Peningkatan kualitas hidup: Akses yang lebih mudah dan lebih terjamin terhadap air bersih. Memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-sehari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebersihan, maupun konsumsi. Tempat pembuangan sampah yang teratur juga meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan sekitar.
3. Pengurangan pencemaran lingkungan: Dengan tersedianya tempat pembuangan sampah yang baik, sampah tidak lagi dibuang sembarangan ke sungai, jalan, atau lingkungan terbuka, yang dapat mencemari tanah dan air. Ini membantu melestarikan lingkungan dan ekosistem.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Infrastruktur air bersih yang memadai dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air, sehingga lebih banyak waktu dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan sampah yang efisien juga dapat membuka peluang pekerjaan baru dalam pengelolaan dan daur ulang sampah.
5. Pencegahan Bencana: Dengan pengelolaan sampah yang baik, tumpukan sampah yang dapat menyumbat saluran air dapat dikurangi, sehingga mengurangi risiko banjir. Akses yang baik terhadap air bersih juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan air saat terjadi bencana.

## **KESIMPULAN**

Pajak Desa merupakan sumber pendanaan penting bagi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peningkatan kesejahteraan komunitas lokal. Pemanfaatan dana pajak desa mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih (PAM) dan pengelolaan sampah yang terorganisir. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan pajak yang efisien memungkinkan desa memperoleh pendapatan yang stabil untuk program-program pembangunan. Dampak penggunaan pajak desa mencakup peningkatan kesehatan masyarakat, lingkungan yang lebih bersih, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pajak desa berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa

### References

- Bagus Yuliat Nurcahyo, S. (2024). EFEKTIFITAS PENGATURAN HUKUM MENGENAI BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA. ( Studi Kasus Di Bumdes Ploso Café Watu Wayang Desa Ploso).Riau: JPDSH. 3, No.9, Juli 2024.
- Chatib, B. (1996). Sistem Penyedia Air Bersih. Diklat Tenaga Teknik PAM. Bandung: LPM-ITB
- dkk, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa  
( Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Malang: JAP. 1, No 1, No 6, 2013, hlm. 1204.
- Muhammad Rafi Akbar Nasuha, A. A. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lingga: ISSN. 3 No.3 September 2024.
- Sutrisno, T. C. (1991). Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Tadanugi, I. N. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Poso: ISSN. 12, No 1, 2019, hlm. 59.